

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. rumusan masalahnya adalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir, menginterpretasikan dan menilai bahan hukum yang relevan. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan pelaku yang tanpa hak menggunakan gelar akademi, gelar vokasi dan gelar profesi dimuat dalam Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dapat diketahui bahwa kasus putusan hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb bahwa terdakwa yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dari unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi. Melihat putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pada kasus ini, hakim pengadilan negeri jambi tidak menjatuhkan hukuman mengenai penipuan dalam hal uang ataupun materi, atau bahkan mengenai pemalsuan jenis kelamin dan identitas palsu, mengingat dakwaan yang telah ditetapkan oleh jaksa penuntut umum hanyalah dakwaan tunggal sehingga penerapan hukum materil dibatasi oleh aturan-aturan hukum materil yang telah disebutkan oleh jaksa penuntut umum.

Kata Kunci:*Putusan, Pelaku tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Gelar Akademik, Vokasi, Profesi.*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the basis for judges' considerations regarding criminals who do not have the right to use academic degrees, vocational degrees and professional degrees. The formulation of the problem is: What is the basis for the judge's consideration in imposing a crime on decision Number 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. This type of research is normative juridical research, and the approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The analysis and legal materials used in this research were carried out by inventorying, interpreting and assessing relevant legal materials. Conclusion: Based on the results of research conducted, the regulation of perpetrators without the right to use academic degrees, vocational degrees and professional degrees is contained in Article 28 paragraph (7) jo. Article 93 of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, it can be seen that in the case of judge's decision Number 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb that the defendant has been charged by the public prosecutor with a single charge, namely violating Article 28 paragraph (7) jo. Article 93 of law number 12 of 2012 concerning higher education, the elements of the article have been fulfilled. Seeing the decision that had been determined by the panel of judges in this case, the Jambi district court judge did not impose a sentence regarding fraud in terms of money or material, or even regarding falsifying gender and false identity, considering that the charges that had been determined by the public prosecutor were only single charges so that the application of material law is limited by the rules of material law which have been stated by the public prosecutor.

Keywords: *Decision, Perpetrator of a Criminal Act, Without Rights, Uses Academic, Vocational, Professional Titles.*